

SISTEM MANAJEMEN RETRIBUSI KAWASAN WISATA

Ewaldus Kase

*Program Studi Sistem Informasi, STIKOM Uyelindo Kupang
E-mail: ewalgnrs@gmail.com*

ABSTRACT

Retribution is one of the potentials in an area which if managed well will produce a source of Local Revenue (PAD). Of the several types of user fees, levies in tourist areas are one of the elements that have a role in Local Revenue (PAD). However, in its management, there are still some potential loss of income due to the weak supervision of the control function of retribution supervision. The Department of Tourism and the Regional Revenue and Asset Service have difficulty in supervising and controlling the retribution process because everything is done manually, while education to the public regarding awareness in paying levies in tourist areas is very minimal. With the establishment of an e-retribution system, it can provide convenience for all stakeholders such as the Tourism Office, the Regional Revenue Service and Regional Assets to supervise and control the process in real time. Through this e-levy system, the community is also given the opportunity to be able to participate in monitoring and controlling the levy system in the tourist area in order to reduce the potential loss of income and extortion practices.

Keywords : *System, Retribution, Revenue, Tourism Area.*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan sektor pariwisata saat ini telah memberikan dampak positif tidak hanya bagi perekonomian masyarakat tetapi juga memberikan dampak pada perekonomian suatu daerah. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan dibidang ekonomi, yang mana jika dikelola dengan baik dan benar maka akan menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001:128). Semakin banyak potensi-potensi yang ada, maka akan semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menggali berbagai potensi yang ada sebagai daya tarik wisatawan, salah satunya dengan cara pungutan (retribusi) pada kawasan wisata.

Tingkat kunjungan wisatawan pada beberapa tahun belakangan ini di Nusa Tenggara Timur (NTT) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan telah menunjukkan hal positif. Kunjungan wisatawan pada tahun 2015 berjumlah 441.316 orang, tahun 2016 berjumlah 496.081 orang, dan tahun 2017 berjumlah 616.538 orang, sehingga dapat diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2018-2020. Dengan peningkatan jumlah wisatawan beberapa tahun ini, kawasan wisata di NTT memiliki potensi terhadap beberapa jenis retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi pada kawasan wisata antara lain karcis masuk, sewa gedung/aula, dan MCK. Namun hingga saat ini masih terdapat berbagai macam masalah yang terjadi di kawasan wisata wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perubahan tarif retribusi terdapat beberapa item retribusi pada kawasan wisata seperti retribusi masuk hanya berlaku kendaraan roda 2 dan roda 4, sedangkan pengunjung tidak diberlakukan retribusi lainnya seperti sewa gedung/aula, sewa lapak, dan MCK. Dinas Pariwisata mengelola kawasan wisata yang terdiri dari 498 kawasan wisata, yang tersebar di seluruh kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kawasan wisata tersebut dikelola oleh Dinas Pariwisata dengan melibatkan beberapa petugas lapangan untuk memungut hasil retribusi dan diserahkan serta dilaporkan ke Dinas Pariwisata bagian pengguna anggaran. Selanjutnya Dinas Pariwisata akan menyetor ke Badan Pengelola Aset Daerah (PAD) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Namun terdapat beberapa potensi

kehilangan pendapatan karena lemahnya fungsi kontrol pengawasan retribusi. Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah dan Aset Daerah mengalami kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol proses retribusi karena semua dilakukan secara manual, sedangkan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran dalam membayar retribusi di kawasan wisata sangatlah minim.

Oleh karena itu diperlukan sistem retribusi berbasis Aplikasi agar dapat memberikan kemudahan pada semua pelaku kepentingan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah untuk mengawasi dan mengontrol proses secara real time.

Melalui Aplikasi e-retribusi masyarakat diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam mengawas dan mengontrol sistem retribusi pada kawasan wisata, bila proses otomatisasi menggunakan identitas kepemilikan baik NIK atau Nomor Plat kendaraan. Dengan adanya pembangunan sistem e-retribusi pada kawasan wisata Nusa Tenggara Timur (NTT), maka dapat mengurangi praktek pungli. Untuk itu, penulis mengambil judul penelitian "Sistem Manajemen Retribusi Kawasan Wisata".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Retribusi Kawasan Wisata

Retribusi menurut UU Nomor 28 tahun 2009 merupakan sebuah pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Kawasan Wisata sendiri merupakan salah satu dari jenis retribusi jasa usaha yang dimana dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Seperti halnya, di wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat banyak kawasan wisata yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 tahun 2019 tentang perubahan Atas Tarif retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Angkutan Umum, Retribusi jasa usaha maka terhitung mulai 1 mei 2019 tarif pada destinasi wisata ada sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Retribusi

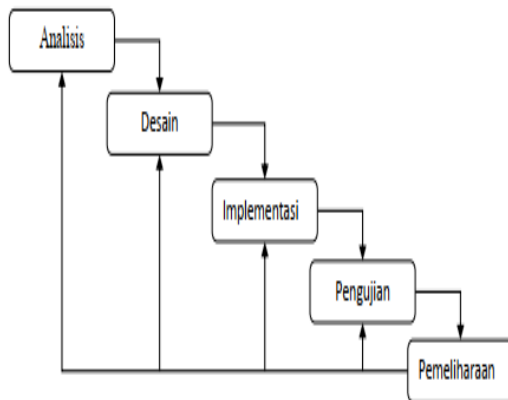
No.	Uraian	Tarif	
		Lama	Baru
1.	Tarif karcis masuk dewasa per orang	Rp. 2.000,-	Rp. -
2.	Tarif karcis masuk anak-anak per orang	Rp. 1.000,-	Rp. -
3.	Tarif karcis masuk Roda 4 per unit	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Tarif karcis masuk Roda 2 per unit	Rp. 5.000	Rp. 5.000
5.	Sewa panggung hiburan per hari	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000

6.	Tarif penggunaan MCK per orang	Rp. -	Rp. 2.000
7.	Sewa lapak per bulan	Rp. 100.000	Rp.100.000

3. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian dilakukan pada daerah kawasan wisata di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Pantai Lasiana dijadikan sebagai tempat objek penelitian. Data yang mendukung dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari objek kawasan wisata Pantai Lasiana Kupang atau data yang diperoleh dari responden melalui kuisinoner dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder berupa data yang sudah ada dari sumbernya atau data yang diperoleh dari mempelajari referensi yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya tentang retribusi.

Tahapan penelitian selanjutnya berupa tahap pengembangan sistem, yang artinya menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Waterfall, dengan tahapan-tahapan yang terdiri dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian sistem, dan pemeliharaan.

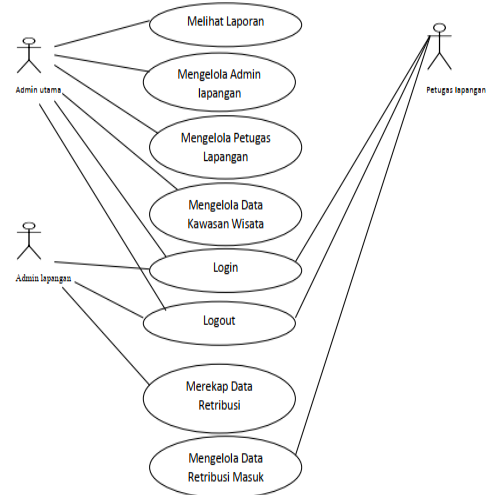


Gambar 1. Metode Waterfall

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perancangan Sistem

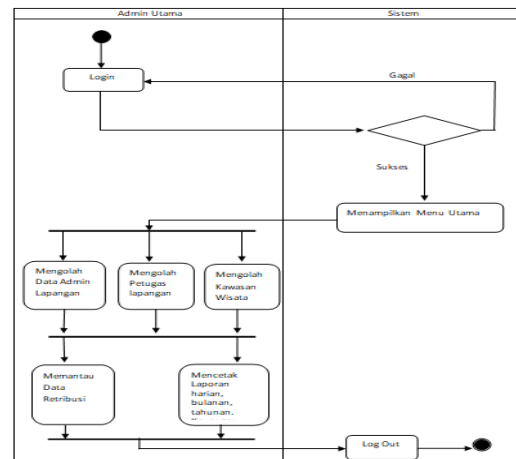
4.1.1 Use Case



Gambar 2. Use Case Diagram

Pada gambar use case dijelaskan bahwa admin pada sistem diatas terdapat 3 aktor yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Admin Utama memiliki tugas antara lain melihat laporan, mengelola data admin lapangan, mengelola data petugas lapangan, mengelola data kawasan wisata, login, dan logout. Admin lapangan bertugas merekap data retribusi masuk dan memiliki hak akses untuk login dan logout. Petugas Lapangan bertugas untuk mengelola data retribusi masuk.

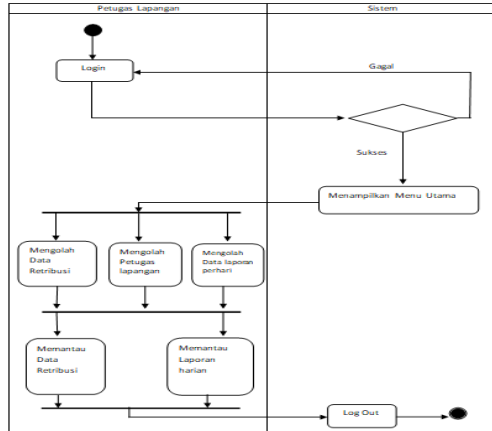
4.1.2 Activity Diagram



Gambar 3. Activity Diagram Admin Utama

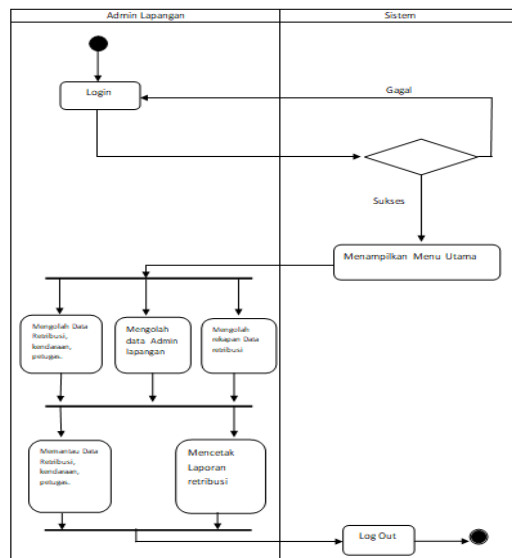
Dalam activity diagram diatas, dijelaskan bahwa admin utama memiliki akses untuk mengolah data admin lapangan, mengolah data

petugas lapangan, mengolah kawasan wisata seperti menambah, mengubah dan menghapus data. Admin utama juga dapat mencetak laporan retribusi harian, bulanan, tahunan dan memantau proses retribusi yang ada.



Gambar 4. Activity Diagram Petugas Lapangan

Pada gambar diatas, dijelaskan bahwa petugas lapangan memiliki hak akses berupa menambah, mengubah, dan menghapus data retribusi, data petugas lapangan, mengolah data laporan, memantau data retribusi, dan memantau data harian. Admin lapangan memiliki tugas untuk merekap data yang telah diinput oleh petugas lapangan.



Gambar 5. Activity Diagram Admin Lapangan

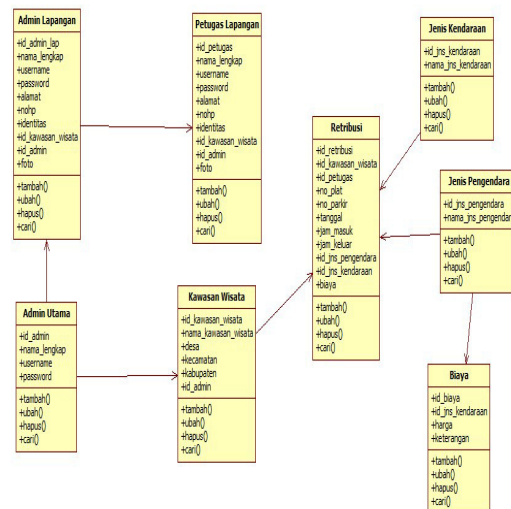
Dijelaskan pada gambar diatas, bahwa admin lapangan memiliki akses untuk mengolah data retribusi, mengolah data kendaraan, mengolah data pengendara, mengolah rekapan data retribusi.

Petugas lapangan memiliki tugas untuk menginput data retribusi masuk pada kawasan wisata.

4.1.3 Class Diagramm

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2012, p101), domain class diagram adalah sebuah diagram UML yang merepresentasikan kelas-kelas domain, atribut, pekerjaan pengguna serta hubungan antar kelas tersebut. Pada class diagram, bentuk kotak menggambarkan classes dan garis menunjukkan hubungan antar class tersebut. Domain class diagram digunakan untuk memahami hubungan antar class yang terdiri dari beberapa objek di dalam pengembangan dan perancangan sistem nantinya.

Pada penelitian ini, setiap kelas yang ada saling terhubung satu sama lain dan Kelas memiliki atribut, metode atau operasi. Diagram kelas mendefinisikan jenis objek dalam sebuah sistem dan hubungan statis yang ada dalam hubungan antar objek. Di bawah ini merupakan class diagram untuk menggambarkan struktur sistem retribusi.



Gambar 6. Class Diagram

Pada penelitian ini, terdapat beberapa kelas yang saling berhubungan satu dengan yang lain terdiri dari Admin Utama, admin lapangan, petugas lapangan, jenis kendaraan, jenis pengendara, kawasan wisata, biaya, dan retribusi. Dibawah ini merupakan class diagram dari sistem retribusi kawasan wisata.

4.2 Implementasi Sistem

4.2.1 Halaman Login

Gambar 7. Login

Halaman login yang diakses admin lapangan sama dengan halaman login petugas lapangan. Untuk mengakses sistem, admin lapangan dan petugas lapangan perlu mengisi username dan password untuk validasi data pengguna sistem yang telah dikelola oleh admin utama.

4.2.2 Halaman Admin Lapangan

No Polisi	No Parkir	Tanggal	Masuk	Keluar	J. Kendaraan	J. Pengendara	Biaya	
DH 3034 CA	1	20190209	08:11	-	Mobil	Tamu	Rp. 10.000	
DH 3411 AB	2	20190209	08:11	-	Mobil	Tamu	Rp. 10.000	
DH 4644 AB	3	20190209	08:11	-	Mobil	Staff	Rp. 10.000	
DH 3034 CA	4	20190209	08:11	-	Mobil	Staff	Rp. 10.000	
DH 3034 CA	5	20190209	08:11	-	Mobil	Tamu	Rp. 10.000	
DH 3306 CA	6	20190209	08:11	-	Mobil	Tamu	Rp. 10.000	
DH 2232 AB	7	20190209	08:11	-	Mobil	Staff	Rp. 10.000	
DH 3321 CA	8	20190209	08:11	-	Mobil	Staff	Rp. 10.000	

Gambar 8. Halaman Admin Lapangan

Setelah login masuk pada halaman admin lapangan, maka sistem akan menampilkan halaman admin lapangan. Pada halaman admin lapangan terdapat beberapa submenu seperti data jenis pengendara, jenis kendaraan, data retribusi, data petugas dan data biaya. Pada gambar diatas, menu data retribusi menjelaskan data retribusi masuk yang terjadi dalam beberapa waktu tertentu. Admin lapangan hanya memiliki akses untuk melihat data retribusi tanpa harus mengubah data yang telah di input oleh petugas lapangan. Admin lapangan bertugas memantau proses retribusi pada kawasan wisata dan merekap data retribusi masuk untuk ditampilkan atau dilaporkan ke admin utama (Dinas Pariwisata).

4.2.3 Halaman Petugas Lapangan

No	No Polisi	No Parkir	Tanggal	Jam Masuk	J. Kendaraan	J. Pengendara	Biaya	
1	DH 3034 CA	5	20190209	08:11	Mobil	Tamu	Rp. 10.000	
2	DH 3306 CA	6	20190209	08:11	Mobil	Tamu	Rp. 5.000	
3	DH 2232 AB	7	20190209	08:11	Mobil	Staff	Rp. 10.000	
4	DH 3321 CA	8	20190209	08:11	Mobil	Staff	Rp. 5.000	

Gambar 9. Halaman Petugas Lapangan

4.2.4 Halaman Admin Utama

Setelah login, admin utama akan diarahkan oleh sistem menuju halaman admin utama. Admin utama memiliki hak akses untuk mengolah data admin lapangan, petugas lapangan dan kawasan wisata. Admin utama dapat memantau perkembangan retribusi masuk yang terjadi pada kawasan wisata dengan mengakses pada menu laporan, yang terdiri dari submenu laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan.

No Parkir	No Polisi	Jam Masuk - Jam Keluar	J. Pengendara - J. Kendaraan	Biaya	Kawasan Wisata	Petugas
7	DH 2232 AB	08:11--	Staff-Mobil	Rp. 10.000	Pantai Lasiana Kota	ewal kase jr
5	DH 3034 CA	08:11--	Tamu-Mobil	Rp. 10.000	Pantai Lasiana Kota	ewal kase jr
8	DH 3321 CA	08:11--	Staff-Motor	Rp. 5.000	Pantai Lasiana Kota	ewal kase jr
6	DH 3306 CA	08:11--	Tamu-Motor	Rp. 5.000	Pantai Lasiana Kota	ewal kase jr

Gambar 10. Halaman Admin Utama

4.2.5 Halaman Cetak Laporan

LAPORAN RETRIBUSI HARIAN

Retribusi Kawasan Wisata

No	No Polisi	Jam Masuk/ Jam Keluar	J. Pengendara / J. Kendaraan	Biaya	Kawasan Wisata	Petugas
5	DH 3034 CA	08:11--	Tamu-Mobil	Rp. 10.000.	Pantai Lasiana Kota	ewal kase jr
6	DH 3306 CA	08:11--	Tamu-Motor	Rp. 5.000.	Pantai Lasiana Kota	ewal kase jr
7	DH 2232 AB	08:11--	Sta#Mobil	Rp. 10.000.	Pantai Lasiana Kota	ewal kase jr
8	DH 3321 CA	08:11--	Sta#Motor	Rp. 5.000.	Pantai Lasiana Kota	ewal kase jr

Gambar 11. Halaman Cetak Laporan

Pada gambar diatas, dijelaskan bahwa admin utama, admin lapangan dan petugas lapangan dapat mencetak laporan sebagai arsip data yang akan disimpan sebagai bukti transaksi retribusi kawasan wisata. Pada form cetak laporan ini, ditampilkan beberapa informasi yang didalamnya terdapat informasi nomor parkir untuk mengetahui berapa jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan wisata, nomor polisi atau nomor plat kendaraan untuk mengetahui nomor kendaraan bermotor, jam masuk untuk mengetahui jam masuk dari kendaraan, jenis pengendara untuk mengetahui apakah yang mengendarai kendaraan bermotor staff kawasan wisata atau tamu/wisatawan, jenis kendaraan untuk mengetahui jenis kendaraan roda 2 atau roda 4, biaya untuk mengetahui biaya berdasarkan jenis kendaraan apakah roda 2 atau roda 4, kawasan wisata untuk mengetahui tempat kawasan wisata agar dan petugas lapangan untuk mengetahui petugas lapangan yang sedang bertugas atau yang menginput data retribusi masuk pada kawasan wisata.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang sistem retribusi kawasan wisata diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem e-retribusi dapat membantu Dinas Pariwisata untuk mengawasi proses retribusi
2. Sistem yang dapat membantu pengolahan data retribusi yang tepat dan data yang ditampilkan selalu up to date
3. Dengan penerapan sistem ini, maka dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transparansi terhadap proses retribusi
4. Mencegah terjadinya praktek kecurangan seperti pungli
5. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol retribusi, maka akan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
6. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

Setelah sistem retribusi ini di buat, maka perlu adanya saran untuk penyempurnaan sistem ini bagi penelitian selanjutnya. Diharapkan kedepannya dapat dikembangkan sistem retribusi yang dapat menjalin kerja sama dengan pihak bank agar segala kegiatan transaksi bisa langsung masuk ke Bank Pembangunan daerah yang mana dapat mengurangi kecurangan pada saat disetorkan ke lembaga Badan Pendapatan Asli Daerah.

REFERENSI

- [1] E. Rakasiwih, dkk, “ Sistem Informasi Peramalan Pendapatan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Palembang”., STIMIK GI MDP, 2013
- [2] R. Maulina,” Sistem Informasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Berbasis Client Server Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung”. J. Inform., vol. 11, 2014, no.1, pp. 34-43
- [3] Hariyanti Sri, Riasti Berliana,”Sistem Informasi Pengelolaan Data Retribusi Perijinan Pasar Gemolong”, Surakarta, Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, vol.7, no 2, pp.2-3, 2015
- [4] Y. Sugiarti, Analisis dan perancangan UML (Unified Modelling Language). Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- [5] H. Said, S. Khairani, and Icha Fajriana, “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” “STIE MDP, no.14, pp. 1-9, 2016
- [6] Murtiani Sofia, dkk, “Sistem Informasi Retribusi Pedagang Pasar Kabupaten Semarang”, Semarang, Transistor EI, vol. 1 no.1, pp. 47-59, 2016
- [7] Hendrawan Jodi, Perwitasari D Ika, “Analisa dan Perancangan Aplikasi Info Wisata Kabupaten Mukomuko Berbasis Android”, Mukomuko, Jurnal Teknik dan Informatika, vol. 5, no.2, pp. 3-4, 2018
- [8] Vikasari Cahya,”Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap”, Cilacap, Jurnal Nasional dan Sistem Informasi, vol.5, no. 1, pp. 2-6, 2019
- [9] Karida Norfi, Retnadi Eko, Satria Eri, “ Perancangan Aplikasi Rekapitulasi Retribusi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut”, Garut, ISSN : 2302-7339, Vol. 11, No. 1, 2014
- [10] Gumilar Ivan,” Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung”, Bandung, JAM, vol.12. no.3, pp. 2-3, 2016